



**PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
NOMOR 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI
KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH NGEPOSARI
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGEPOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 6 Tahun 2020;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 13)
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 79);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);
23. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 6 Tahun 2018 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngeposari Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2018 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2018 Nomor 9);
25. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 5);
27. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 10);
28. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2020 Nomor 6);
29. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGEPOSARI
dan
LURAH NGEPOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	:	Rp. 2.563.264.700,00
2. Belanja Kalurahan	:	<u>Rp. 2.654.509.432,00</u>
Surplus/(Defisit)	:	(Rp. 91.244.732,00)
3. Pembiayaan Kalurahan :		
a. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 91.244.732,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp. <u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	:	Rp. 91.244.732,00
SilPA tahun anggaran berkenaan	:	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngeposari.

Ditetapkan di : Ngeposari
pada tanggal : 30 Desember 2020



Diundangkan di Ngeposari
pada tanggal 30 Desember 2020

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aliftha Zulaikha'.

ALIFTA ZULAIKHA
LEMBARAN KALURAHAN NGEPOSARI TAHUN 2020 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	99.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.460.264.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.563.264.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	929.635.616,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	896.411.816,00	
5.3.	Belanja Modal	558.762.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	269.700.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.654.509.432,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(91.244.732,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.244.732,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	91.244.732,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	91.244.732,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngeposari, 30 Desember 2020



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	99.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.460.264.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.563.264.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.225.178.432,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.039.323.412,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.635.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.635.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	788.987.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	788.987.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	51.913.216,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	51.913.216,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	76.057.796,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.057.796,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	9.630.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.630.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.000.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.900.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	4.900.000,00	DLL, PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.450.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.950.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	500.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	167.280.020,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.075.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.075.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.867.170,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.867.170,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.200.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12.902.050,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.902.050,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	13.750.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	93.335.800,00	PAD, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.335.800,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	6.300.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.91		Pengisian perangkat desa	18.650.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.225.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1.225.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.225.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>813.790.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	50.925.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)	3.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	25.125.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.125.000,00	
2.1.92		Pembinaan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa	5.600.000,00	DDS
2.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan		
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	119.020.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	DDS
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	10.000.000,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	DDS
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.300.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.120.000,00	DDS
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13.120.000,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	DDS
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	11.280.000,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	DDS
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	21.600.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.720.000,00	DDS
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.720.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	401.159.000,00	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.570.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	1.570.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	50.000.000,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	282.343.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	8.925.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	273.418.000,00	
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.246.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	3.550.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	63.696.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	96.831.500,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.681.500,00	DDS
2.4.93		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	81.681.500,00	
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.150.000,00	DDS
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.150.000,00	
2.5.90		Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	45.640.000,00	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.640.000,00	DDS
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.000.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	DDS
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.000.000,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	DDS
2.7.		Sub Bidang Pariwisata	4.000.000,00	
2.7.			92.215.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2 8 02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik ***)	92.215.000,00	DDS
2 8 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
2 8 02	5.3.	Belanja Modal	89.365.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>45.285.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.575.000,00	
3 2 03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.575.000,00	PAD
3 2 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.575.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	36.050.000,00	
3 3 90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	32.300.000,00	PAD
3 3 90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.300.000,00	
3 3 93		Operasional Karang Taruna	3.750.000,00	PBH
3 3 93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.640.000,00	
3 4 95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	2.980.000,00	PAD
3 4 95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	
3 4 96		Operasional PKK	3.660.000,00	PAD
3 4 96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>300.575.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	13.975.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tan/Gapoktan	13.975.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.975.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	115.100.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	95.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	20.100.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.100.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	67.037.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.450.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	4.525.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.525.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	6.262.500,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.262.500,00	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	44.800.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.800.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.900.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di t ingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	4.900.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	29.825.000,00	

KODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
		4	5
5.90	Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa	29.825.000,00	DDS
5.90 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	
5.90 5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	69.738.000,00	
7.02	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	58.738.000,00	DDS
7.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.455.000,00	
7.02 5.3.	Belanja Modal	57.283.000,00	
7.91	Pengelolaan pasar desa	11.000.000,00	PAD
7.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	269.700.000,00	
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	89.700.000,00	
1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	89.700.000,00	DDS
1.01 5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.700.000,00	
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
3.01 5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.654.509.432,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(91.244.732,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	91.244.732,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	91.244.732,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Posari, 30 Desember 2020

